

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).

Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Cetakan Ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

_____. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Edisi Kedua*, Cetakan Ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

_____. *Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. (Jakarta: Sekretariat Jendral MKRI, 2004).

_____. dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Attamimi, A. Hamid S. *UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang (kaitan norma hukum ketiganya)*. (Jakarta: 1981).

_____. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I Pelita IV) Ringkasan Buku Disertasi Doktor Universitas Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia: 1990).

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Gandasubrata, Purwoto. *Renungan Hukum*. (Ikatan Hakim Indonesia: Maret, 1998).

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati. *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning): Langkah-langkah Legal Problem*

Solving dan Penyusunan Legal Opinion. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).

Joeniarto. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara, 1982).

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. (New York: Russel & Russel: 1973).

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. (Jakarta: Indo Hill, 1992).

Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2011).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

_____. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008).

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Mertokusuno, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cetakan Ke-2. (Yogyakarta: Liberty, 1986).

Muchsin. “*Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*” (STIH IBLAM: Jakarta, 2004).

Notonegoro. *Pancasila Dasar Falsadiah Negara (Kumpulan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan Tentang Pancasila)*. Cetakan Ke-7. (Jakarta: Bina Aksara, 1988).

Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Cetakan Ke-1. (Jakarta: Konstitusi Press, 2018).

Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Rato, Dosminikus. *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta: PT Presindo, 2010).

Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. (Jakarta: Kencana Praneda Media Original, 2012).

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Cetakan Ke-3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Soeprapto, Maria Farida Indriati. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius, 2006).

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 1999).

Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Cetakan ke-6. (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 2011).

B. Makalah/Jurnal

Aziz, Machfud. “Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7, Nomor 5, Tahun 2010.

Isra, Saldi. “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi”. Makalah. Disampaikan pada Seminar tentang Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 13 November 2014).

Laksono, Fajar, dkk. “Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Tahun 2013.

N.B, Elisabeth. “Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum menurut UU No. 4 Tahun 2004”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 22. Nomor 1. Tahun 2010.

Suhariyanto, Budi. “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 13. Nomor 1. Tahun 2016.

C. Internet

[https://dictionary.thelaw.com/erga-omnes/.](https://dictionary.thelaw.com/erga-omnes/), diakses pada 3 Maret 2019.

https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/erga_omnes., diakses pada 10 Maret 2019.

http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/319/ky-dukung-kekuasaan-kehakiman., diakses pada 21 April 2019.

<https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/302-negative-legislator,html.>, diakses pada 2 Februari 2019.

Kalo, Syafruddin. "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat". <http://www.academia.edu.com>, diakses 1 Febuari 2019.

Taufiqurohman, Syahuri. "Konstitusionalitas Regulasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". <http://www.djpp.depukumham.go.id>, diakses 31 Januari 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4317)*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109)*.

Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515)*.

Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1063)*.

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30/PUU-XVI-2018.*

Mahkamah Agung. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65 P/HUM/2018.*